



LKj

LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

2016



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**

<http://dinsos.bulelengkab.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
B STRUKTUR ORGANISASI	2
C ISU-ISU STRATEGIS	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
B PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
1. Realisasi Capaian Kinerja Tahunan	14
2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	16
B. REALISASI ANGGARAN	22.
BAB IV PENUTUP	23.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Indikator Kinerja Utama
	Perjanjian Kinerja
	Pengukuran Kinerja

KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan, sekaligus merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan laporan pelaksanaan hasil kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 yang merupakan tahun empat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2012-2017.

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2016 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian Laporan Kinerja menjadi bagian dari system pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal, dengan harapan ada perbaikan di masa mendatang.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

DRS. GEDE KOMANG .M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19591231 198503 1 212

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat berorientasi kepada visi, misi dan tujuan suatu organisasi, dengan memperhitungkan kekuatan, hambatan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin terjadi. Penyelenggaraan program kegiatan di bidang/ urusan sosial pada Dinas Sosial sebagaimana ditetapkan Penetapan Kinerja tahun 2016.

Penetapan kinerja memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat operasional, dengan mengacu pada Renstra 2012-2017 dan Rencana Kerja tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa 5 sasaran tercapai dengan predikat sangat berhasil dan 1 sasaran dengan 4 sub sector sasaran tercapai dengan predikat sangat berhasil. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran di bidang sosial antar lain :

1. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Dinas Sosial Provinsi Bali , Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Polsek, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga kesejahteraan sosial lainnya .
2. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) , Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna, LKS/ Orsos , LK3 dan Dunia Usaha.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, WKSBM, Forum Komunikasi Panti Asuhan .

Meskipun pencapaian sasaran relatif berhasil, namun demikian masih terdapat permasalahan sosial yang menjadi tantangan, diantaranya adalah :

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih relatif besar dengan permasalahan yang semakin komplek.
2. Belum adanya keterpaduan data, khususnya dalam penanganan kemiskinan, antara data kemiskinan yang diterbitkan BPS dan hasil pendataan PPLS 2011 melalui TNP2K.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng nomor 32 tahun 2011 tentang Peraturan Atas perubahan Peraturan Bupati Buleleng nomor 43 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang sosial .

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial;
- c. Pelaksanaan Rehabilitasi penyandang permasalahan sosial ;
- d. Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial ;
- e. Pemberian perijinan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
- g. PengelolaanTata Usaha Dinas .
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Umum
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial , terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
 2. Seksi Penyuluhan dan Sumbangan Sosial
 3. Seksi Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat
- d. Bidang Pelayanan Sosial , terdiri dari :
 1. Seksi Kesejahteraan Lanjut Usia
 2. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga
 3. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial , terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 3. Seksi Rehabilitasi Anak-Anak Nakal dan Korban Napza
- f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Sosial
 2. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial
 3. Seksi Kepahlawanan dan Monumen Perjuangan
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Monumen Tri Yudha Sakti , terdiri dari :
 1. Kepala UPTD Monumen Tri Yudha sakti
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

C. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD :

Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja dari pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial; Pelaksanaan rehabilitasi penyandang permasalahan sosial; Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial; Pemberian perijinan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan baik yang menyangkut pelayanan social, pemberdayaan lembaga social maupun pembinaan teruna teruni serta yang berkaitan dengan penataan dan pelestarian monumen serta penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya penanganan Isu Strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.

Program dan kegiatan tersebut akan menjawab terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Buleleng terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana

dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial maupun pencapaian MDGs dalam penanggulangan kemiskinan .

Kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial/Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, dan bantuan rumah tidak layak huni (rehab rumah dan bedah rumah), maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan. untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan seterusnya termasuk pemberian bahan bangunan rumah.

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruh wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan . Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap , terpadu dan berkesinambungan dengan SKPD/ Lembaga terkait .

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali (Jatim) tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial;
- c. Penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dll) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya;
- d. Rentannya wilayah Buleleng terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud.
- e. Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng , orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan) .
- f. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan ataupun di stop karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya.

Adapun peluang dimaksud adalah :

- a. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah sosial.
- b. Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;

- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik Dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2012-2017, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 .

Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2016 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan sosial yang menjadi Urusan Sosial yang ada di Kabupaten Buleleng.

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan menjadi tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu “ Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial “yaitu :

1. Meningkatnya cakupan pelayanan terhadap PMKS dengan Sasaran Strategis :
 - Meningkatnya Efektifitas Pelayanan terhadap PMKS, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Prosentase (%) Peningkatan PMKS yang Mapan, dengan target : 17,5 %
 - b. Prosentase (%) Penurunan Jumlah PMKS , dengan target : 25 %
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS, dengan Sasaran Startegis :
 - Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Prosentase (%) Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif dalam penanganan PMKS , dengan target : 30 %
 - Meningkatnya Nasionalisme dan Kesetiakawanan Sosial , dengan Indikator Kinerja :
 - a. Prosentase (%) masyarakat terhadap jiwa nasionalisme dan kesetiakawanan sosial , dengan target : 80 %

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS SOSIAL
TAHUN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET (%)	PROGRAM
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan terhadap PMKS	a. Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. b. Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah memperoleh jaminan sosial c. Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama atau kelompok sosial ekonomi lainnya d. Prosentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat e. Prosentase cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial	75 70 20 100 90	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Narkoba) 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS	a. Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS - Karang Taruna - Pekerja Sosial Masyarakat b. Prosentase panti sosial skala kabupaten yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	 9 9 90	1. Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo 2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

		c. Prosentase WKSBM yg menyediakan sarana prasa - rana pelayanan kesejahteraan sosial	25	4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
--	--	--	----	---

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
<u>Sasaran 1</u> Meningkatnya Efektifitas Pelayanan terhadap PMKS.	Prosentase (%) Peningkatan PMKS yang mapan	17,5 %	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	130.230.000,00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	64.936.000,00
			Program Pembinaan Anak Terlantar	64.936.000,00
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	46.831.000,00
			Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	42.000.000,00
	Prosentase (%) Penurunan Jumlah PMKS	25%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	85.850.000,00
			Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	139.591.593,00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	31.589.518,00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.082.700,00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	279.495.000,00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	137.872.500,00
			Program Pembinaan Anak Terlantar	137.140.000,00
			Program pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	53.975.000,00
			Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	1.348.755.165,00

<u>Sasaran 2</u> Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS	Prosentase (%) peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS.	30%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	35.954.000,00 78.930.000,00 83.330.000,00 115.056.070,00 96.051.666,00
<u>Sasaran 3</u> Meningkatnya Nasionalisme dan Kesetiakawanan Sosial	Prosentase (%) masyarakat terhadap jiwa nasionalisme dan kesetiakawananan sosial	80%	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	14.499.542.875,00 198.000.000,00 334.514.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial	1. Tertingkatnya cakupan pelayanan terhadap PMKS	a. Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. b. Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi lainnya c. Prosentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat d. Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah memperoleh jaminan sosial e. Prosentase cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial
		2. Tertingkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS	a. Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS - Karang Taruna - Pekerja Sosial Masyarakat b. Prosentase panti sosial skala kabupaten yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial c. Prosentase WKSBM yg menyediakan sarana prasarana

			pelayanan kesejahteraan sosial
--	--	--	--------------------------------

Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi :

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100%	: Sangat berhasil
Capaian kinerja >70 sd <85%	: Berhasil
Capaian kinerja >55 sd <70%	: Cukup berhasil
Capaian kinerja < 55 sd 0%	: Tidak berhasil

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahunan :

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial tahun 2016 dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1.	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80	80	100
2	Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE (kelompok Usaha Bersama) atau kelompok sosial ekonomi lainnya	25	25	100
3	Prosentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100
4	Prosentase PMKS penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak	80	80	100

	potensial yang telah memperoleh jaminan sosial			
5	Prosentase Cakupan system Jaminan dan Bantuan Sosial	90	83,19	92,43

Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	URAIAN	CAPAIAN IKU
1.	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	$= \frac{\sum \text{PMKS yg memperoleh bantuan sosial}}{\sum \text{PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial}} \times 100\%$ $= \frac{\sum 14.697}{\sum 14.697} \times 100\%$ $= 100 \%$
2.	Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE (kelompok Usaha Bersama) atau kelompok sosial ekonomi lainnya	$= \frac{\sum \text{PMKS yg memperoleh pemberdayaan sosial}}{\sum \text{PMKS yang seharusnya menerima pemberdayaan sosial}} \times 100\%$ $= \frac{\sum 100}{\sum 100} \times 100\%$ $= 100 \%$
3.	Prosentase PMKS yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$= \frac{\sum \text{PMKS yg menerima bansos selama masa tanggap darurat}}{\sum \text{PMKS yg seharusnya menerima bansos selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$ $= \frac{\sum 500}{\sum 500} \times 100\%$ $= 100 \%$
4.	Prosentase PMKS penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah memperoleh jaminan sosial	$= \frac{\sum \text{penyandang cacat fisik dan mental, serta LU yang peroleh jamsos}}{\sum \text{penyandang cacat fisik dan mental, LU yg seharusnya peroleh jamsos}} \times 100\%$

		$= \frac{\sum 1.038}{\sum 1.038} \times 100\%$ $= 100 \%$
5.	Prosentase cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial	$\frac{\sum \text{PMKS yg menerima sistem jaminan dan bantuan sosial}}{\sum \text{PMKS yg seharusnya menerima sistem jaminan dan bantuan sosial}} \times 100\%$ $= \frac{\sum 2.614}{\sum 3.142} \times 100\%$ $= 83,19 \%$

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran 1.

“Tertingkatnya cakupan pelayanan terhadap PMKS”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Tertingkatnya kesadaran masyarakat dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial meliputi 5 (lima) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 98,48 %, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Tertingkatnya cakupan pelayanan terhadap PMKS.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016			Target 2017
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	75	80	80	100	80
2.	Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi lainnya	10	25	25	100	25
3.	Prosentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan	100	100	100	100	100

	sosial selama masa tanggap darurat					
4.	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah memperoleh jaminan sosial	70	80	80	100	80
5.	Prosentase cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial	89,26	90	83,19	92,43	90

1. Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Realisasi pencapaian indikator prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 80 %, diperoleh dari jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (14.697 orang) dibandingkan dengan (14.697 orang) orang dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 100 %.

2. Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi lainnya

Indikator ini merupakan salah satu indikator pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Program pemberdayaan dilaksanakan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya. Pencapaian indikator kedua sebesar 25 %, diperoleh dari jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui usaha bersama atau kelompok sosial 10 KUBE/100 KK dibagi jumlah KK miskin yang diusulkan sebanyak 10 KUBE/100 KK dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 100 %.

3. Prosentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Pencapaian indikator ketiga sebesar 100% dikarenakan bencana alam yang disertai dengan masa tanggap darurat dengan target sebanyak 500 KK . Pada tahun 2016,

korban bencana alam yang memperoleh bantuan berupa logistik sebanyak 500 Kepala Keluarga.

4. Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah memperoleh jaminan sosial.

Penghitungan capaian indikator ke empat sebesar 100 %, diperoleh dari jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah memperoleh jaminan sosial sosialnya (1.038 orang) dibanding jumlah penyandang cacat dan lanjut usia (1.038 orang) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 80 % diperoleh angka capaian sebesar 100 %.

5. Prosentase cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial.

Pencapaian indikator prosentase cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial sebesar 83,19 % diperoleh dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh sistem jaminan dan bantuan sosial (2.614 KK) dibanding jumlah usulan Keluarga Miskin (3.142 KK) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 90 % diperoleh angka capaian sebesar 92,43 %.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
2. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga sosial.
2. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Tenaga Kersejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana, Karang Taruna, LKS, LK3 dan dunia usaha.

Sasaran 2.

“Tertingkatkan kualitas pelayanan terhadap PMKS”.

Pencapaian sasaran Tertingkatkan kualitas pelayanan terhadap PMKS dilaksanakan melalui 3 indikator kinerja sasaran dan 2 (dua) sub indikator sasaran, menunjukkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016			Target 2017
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS					
	- Karang Taruna	9	9	9	100	9
	- Pekerja Sosial Masyarakat	9	9	9	100	9
2.	Prosentase panti sosial skala kabupaten yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	21	16	16	100	16
3.	Prosentase WKBSM yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2	2	2	100	2

1. Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS

Pencapaian peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS sebesar 100 %, ditunjukkan dengan jumlah lembaga yang berperan sebanyak 9 lembaga dari target sebanyak 9 lembaga. Sedangkan jumlah Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat yang berperan dalam penanggulangan PMKS dari target sebanyak 9 Karang Taruna dan 9 orang, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% .

2. Prosentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Pencapaian indikator Prosentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100 %. Angka ini diperoleh dari jumlah panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (16 panti) dibanding jumlah panti yang seharusnya

menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (16 panti) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % diperoleh angka capaian sebesar 100 %.

3. Prosentase WKBSM yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Realisasi pencapaian indicator Prosentase WKBSM yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100%. Hasil pengukuran diperoleh dari jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (2 WKBSM) dibagi jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (2 WKBSM). Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 100 %.

Pencapaian target indicator sasaran dilaksanakan melalui program berikut :

1. Program Subsidi Kebutuhan Dasar Anak Panti/Panti Jompo
2. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, WKBSM, Forum Komunikasi Panti Asuhan (Forkapa), Corporate Social Responsibility (CSR) Dunia Usaha, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dharma Bhakti – Buleleng, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.
2. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Bali, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 1 dan 2 antara lain :

1. Belum adanya keterpaduan data, khususnya dalam penanganan kemiskinan, antara data kemiskinan yang diterbitkan BPS dan hasil pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Buleleng
2. Terbatasnya sumberdaya pelaksanaan kegiatan penanganan PMKS

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi data PMKS, dalam hal ini data KK miskin terkait dengan Program Perlindungan Sosial dengan TKPK Kabupaten Buleleng dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

2. Mengoptimalkan kinerja sumberdaya pelaksana dan meningkatkan kerjasama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

B. REALISASI ANGGARAN

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan terhadap PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	1.564.835.165	1.527.775.346	97,63
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	516.975.718	508.770.820	98,41
		Program Pembinaan Anak Terlantar	169.140.000	166.831.105	98,63
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	186.422.593	183.765.965	98,57
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	96.051.666	96.040.830	99,98
		Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	95.975.000	92.597.150	96,48
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	313.270.070	305.827.108	97,62

BAB IV PENUTUP

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana diuraikan dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja , secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, serta mengarah kepada pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yakni ***“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN , PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL BERDASARKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA ”.***

Namun demikian, terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai yang akan diupayakan perbaikannya. Penataan ulang terhadap perancangan program dan kegiatan di tahun mendatang yang mengarah pada penanganan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama.

Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini di masa mendatang.

Lampiran 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL
TAHUN 2016

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan terhadap PMKS.	1. Prosentase (%) Peningkatan PMKS yang mapan	a. Cara pengukuran : Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial bisa mapan dibagi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang seharusnya bisa mapan dikalikan 100% b. Tipe penghitungan : Mandiri per tahun c. Sumber data : Dinas Sosial
		2. Prosentase (%) Penurunan Jumlah PMKS	a. Cara pengukuran : Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dibagi jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikalikan 100% b. Tipe penghitungan : Mandiri per tahun c. Sumber data : Dinas Sosial
2	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat Miskin .	Prosentase peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS .	a. Cara pengukuran : Jumlah PSKS yang memberikan bantuan dan pelayanan sosial bagi PMKS dibagi Jumlah PSKS yang seharusnya memberikan bantuan dan pelayanan sosial bagi PMKS. dikalikan 100% b. Tipe penghitungan : Mandiri per tahun c. Sumber data : Dinas Sosial

Lampiran 2
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran 1 Tertingkatnya cakupan pelayanan terhadap PMKS	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	80	100
	Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi lainnya	25	25	100
	Prosentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100
	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah memperoleh jaminan sosial	80	80	100
	Prosentase Cakupan Sistem Jaminan dan bantuan Sosial	90	83,19	92,43
Sasaran 2 Tertingkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS	Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS	9	9	100
	- Karang Taruna	9	9	100
	- Pekerja Sosial Masyarakat	9	9	100
	- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	21	21	100
	- Petugas Pendamping PKH			

Lampiran 3
PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
<u>Sasaran 1</u> Meningkatnya Efektifitas Pelayanan terhadap PMKS.	Prosentase (%) Peningkatan PMKS yang mapan	17,5 %	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	130.230.000,00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	64.936.000,00
			Program Pembinaan Anak Terlantar	64.936.000,00
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	46.831.000,00
			Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	42.000.000,00
	Prosentase (%) Penurunan Jumlah PMKS	25%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	85.850.000,00
			Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	139.591.593,00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	31.589.518,00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.082.700,00

<u>Sasaran 2</u> Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS	Prosentase (%) peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS.	30%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	279.495.000,00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	137.872.500,00
			Program Pembinaan Anak Terlantar	137.140.000,00
			Program pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	53.975.000,00
			Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	1.348.755.165,00
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	35.954.000,00
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	78.930.000,00
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	83.330.000,00
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	115.056.070,00
			Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	96.051.666,00

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Tahun 2016

<u>Sasaran 3</u>				
Meningkatnya Nasionalisme dan Kesetiakawanan Sosial	Prosentase (%) masyarakat terhadap jiwa nasionalisme dan kesetiakawananan sosial	80%	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	14.499.542.875,00
			Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	198.000.000,00
			Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	334.514.000,00

HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015	TAHUN 2016			TARGET 2017	CAPAIAN 2015 THD 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Terhadap PMKS	Peningkatan PMKS yang Mapan	25 PMKS	30 PMKS	20 PMKS	23 PMKS	86,95	35 PMKS	85,71	Dinas Sosial